

PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI TIGA PROVINSI JAWA TAHUN 2025

Dina Safirah

dinasafirah.2025@student.uny.ac.id

Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan status kewilayahan terhadap persentase penduduk miskin di 100 kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2025. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder cross-section, studi ini membandingkan dua spesifikasi model ekonometrika, yakni Ordinary Least Squares (OLS) dengan robust standard error dan model fungsional logaritmik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model logaritmik memberikan estimasi yang lebih baik dengan nilai koefisien determinasi (R-Squared) sebesar 67,59% serta terbebas dari masalah heteroskedastisitas dibandingkan model dasar OLS (62,48%). Berdasarkan analisis pada kedua model, RLS terbukti secara konsisten memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan persentase penduduk miskin. Sementara itu, upah minimum belum memberikan pengaruh yang signifikan secara nominal pada model OLS, namun menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan ketika diestimasi menggunakan pendekatan persentase elastisitas pada model logaritmik. Di sisi lain, variabel dummy status kewilayahan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada seluruh model. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa akumulasi modal manusia melalui pendidikan formal merupakan instrumen paling krusial dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan pembagian administratif antara wilayah kabupaten dan kota sudah tidak lagi menjadi pengaruh utama variasi kemiskinan di tiga provinsi utama Pulau Jawa pada tahun 2025.

Kata Kunci: Kemiskinan, Upah Minimum, Rata-Rata Lama Sekolah, Status Kewilayahan, Regresi Logaritmik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Regency/City Minimum Wage, Mean Years of Schooling (RLS), and regional status on the percentage of the poor population across 100 regencies/cities in West Java, Central Java, and East Java Provinces in 2025. Employing a quantitative approach with cross-sectional secondary data, this study compares two econometric specifications: Ordinary Least Squares (OLS) with robust standard errors and a logarithmic functional model. The empirical results demonstrate that the logarithmic model provides a better estimation with a coefficient of determination (R-Squared) of 67.59% and is free from heteroskedasticity issues compared to the baseline OLS model (62.48%). Based on both models, RLS consistently exhibits a significant negative effect on reducing the poverty percentage. Meanwhile, the minimum wage does not show a significant effect nominally in the OLS model, but it demonstrates a significant negative impact when estimated using the elasticity percentage approach in the logarithmic model. On the other hand, the regional status dummy variable is proven to be insignificant in affecting the poverty level across all models. This study concludes that the accumulation of human capital through formal education is the most crucial instrument for poverty alleviation, while the administrative dichotomy between regencies and urban cities is no longer a primary determinant of poverty variation in the three main provinces of Java Island in 2025.

Keywords: Poverty, Minimum Wage, Mean Years of Schooling, Regional Status, Logarithmic Regression.

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan agenda global yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan, baik di negara maju maupun berkembang. Komitmen global ini secara formal diintegrasikan ke dalam nilai pertama Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan pengentasan segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030. Di tingkat domestik, Indonesia masih dihadapkan pada urgensi penanggulangan kemiskinan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi penduduk miskin di Indonesia mencapai puluhan juta jiwa dengan pola persebaran yang timpang antarwilayah. Secara konseptual, kemiskinan tidak lagi dipandang sekadar sebagai ketidakmampuan absolut dalam memenuhi kebutuhan dasar materiil (basic needs) seperti pangan, sandang, dan papan (Dinayanti et al., 2018). Fenomena ini bersifat multidimensional dan kompleks, sebab berkorelasi langsung dengan keterbatasan akses terhadap penghasilan yang layak, kualitas kesehatan, serta pendidikan (Rosana, 2019). Ketika masyarakat terjebak dalam kelangkaan ekonomi, akumulasi modal manusia (human capital) akan terhambat, yang pada jangka panjang memicu lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty).

Dalam bidang ekonometrika pembangunan, kebijakan upah minimum bertindak sebagai instrumen intervensi pasar tenaga kerja yang penting terhadap kesejahteraan rumah tangga. Upah merupakan sumber utama pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan. Jika tingkat upah menurun atau tidak mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat akan langsung melemah sehingga risiko kemiskinan semakin meningkat (Ningrum, 2017). Masalah ini semakin rumit karena adanya perbedaan besar antara sektor formal dan informal di dunia kerja. Sektor formal wajib mematuhi aturan upah minimum, sedangkan sektor informal sering kali tidak memiliki standar upah yang jelas meskipun menampung sangat banyak pekerja. Selain itu, ketika upah minimum gagal mengimbangi naiknya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di suatu daerah, hal ini sering dinilai sebagai pemicu bertambahnya angka kemiskinan (Sari, 2021).

Selain instrumen finansial, penguatan kualitas modal manusia melalui jalur pendidikan formal memegang peranan penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Secara teoritis, investasi pada pendidikan mampu meningkatkan kapasitas produktif individu yang berimplikasi pada peningkatan return ekonomi di pasar tenaga kerja (Schultz, 1961; Mankiw et al., 1992). Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merepresentasikan durasi akumulatif yang dihabiskan oleh penduduk dalam institusi pendidikan formal. Rendahnya capaian RLS di suatu wilayah mengindikasikan rendahnya daya saing angkatan kerja lokal, yang berdampak pada tingginya probabilitas rumah tangga untuk jatuh di bawah garis kemiskinan.

Kesenjangan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lokasi, terutama perbedaan status antara wilayah kabupaten dan kota. Secara umum, wilayah kota lebih diuntungkan karena menjadi pusat kegiatan ekonomi, memiliki infrastruktur yang lengkap, dan akses layanan dasar yang mudah. Sebaliknya, wilayah kabupaten sering kali menghadapi hambatan karena kurangnya fasilitas pokok tersebut (Firdaus & Muchlisoh, 2021). Pola nyata di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di wilayah perdesaan/kabupaten cenderung lebih tinggi daripada wilayah perkotaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak upah, pendidikan (RLS), maupun letak wilayah terhadap kemiskinan secara terpisah. Namun, studi yang menggabungkan ketiga variabel tersebut secara serentak untuk wilayah Pulau Jawa masih belum banyak ditemukan. Pemilihan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa

Timur didasari oleh adanya sebuah kondisi yang berlawanan. Ketiga provinsi tersebut merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun pada kenyataannya wilayah ini justru menjadi pusat bermukimnya penduduk miskin dengan jumlah tertinggi secara nasional. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, RLS, dan status kewilayahan (menggunakan variabel dummy) terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota pada tiga provinsi utama Pulau Jawa tahun 2025. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan kausalitas antarvariabel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan struktur silang tempat (cross-section) pada tahun 2025. Unit observasi dalam penelitian ini mencakup populasi sebanyak 100 wilayah administratif tingkat kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi utama Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penggunaan sampel jenuh diterapkan dengan mengambil seluruh populasi target sebagai objek pengamatan.

Variabel dependen dalam studi ini adalah Persentase Penduduk Miskin. Sementara itu, variabel independen terdiri dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Seluruh data sekunder tersebut dihimpun dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta dokumen Keputusan Gubernur di masing-masing provinsi terkait penetapan upah minimum tahun 2025. Di samping variabel metrik, penelitian ini mengakomodasi karakteristik spasial wilayah melalui penggunaan variabel dummy status kewilayahan, di mana nilai 1 (satu) merepresentasikan entitas wilayah kabupaten dan nilai 0 (nol) merepresentasikan entitas kota.

Teknik analisis data mengandalkan metode ekonometrika Regresi Linier Berganda. Untuk mendapatkan spesifikasi model yang paling baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan, penelitian ini membandingkan dua bentuk fungsional model, yakni model dasar Ordinary Least Squares (OLS) dan model fungsional logaritmik. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan (inferensi), model dievaluasi menggunakan serangkaian Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas residual, uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), serta uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan Test. Berdasarkan prosedur diagnostik, apabila suatu model terdeteksi mengalami masalah heteroskedastisitas (varian residual tidak konstan), maka estimasi model akan dikoreksi menggunakan pendekatan Robust Standard Error agar hasil uji statistik tetap terpercaya dan tidak bias. Kelayakan model regresi dan pengujian hipotesis diukur melalui koefisien determinasi $[(R)^2]$, uji kelayakan model secara simultan (Uji F), serta uji signifikansi parameter secara parsial (Uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan interpretasi terhadap model regresi, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian ini mencakup uji normalitas, uji

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

- a) Uji Normalitas: Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual pada kedua model, diperoleh nilai p-value sebesar 0.9511 untuk Model 1 (OLS) dan 0.1691 untuk Model 2 (Logaritmik). Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa residual pada kedua model terdistribusi secara normal.
- b) Uji Multikolinearitas: Pengujian multikolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (Upah Minimum, RLS, dan Status Wilayah) pada kedua model memiliki nilai VIF di bawah 10 (berkisar antara 1,37 hingga 3,12). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen, sehingga model terbebas dari masalah multikolinearitas.
- c) Uji Heteroskedastisitas: Melalui uji Breusch-Pagan, Model 1 (OLS) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0005 ($<0,05$), yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Sementara itu, Model 2 (Logaritmik) memiliki probabilitas 0.3489 ($>0,05$), yang berarti bebas dari heteroskedastisitas. Untuk mengatasi kendala pada Model 1 dan memastikan perbandingan yang valid, estimasi regresi pada penelitian ini menggunakan pendekatan Robust Standard Error.

2. Hasil Estimasi Regresi dan Pemilihan Model

Penelitian ini membandingkan dua model estimasi regresi berganda, yaitu pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) standar dan bentuk fungsional logaritmik, untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap persentase penduduk miskin di 100 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2025.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Variabel	Coef. (Model 1)	Robust Std. Err (Model 1)	t-statistik (Model 1)	P > t (Model 1)	Coef. (Model 2 Log)	Robust Std. Err (Model 2)	t-statistik (Model 2)	P > t (Model 2)
Constan	25,588115	3,255028	7,861105	0,0000	7,544722	1,324864	5,694715	0,0000
UMR /			-		-		-	
In_UMR	-0,000033	0,00000217	1,531158	0,129019	0,270406	0,093841	2,881537	0,004882
RLS	-1,772113	0,326315	5,430688	0,0000	0,173344	0,027025	6,414282	0,0000
Stawil	-0,378912	0,887374	0,427003	0,670333	0,116939	0,100276	1,166171	0,246434
R-Squared	Model 1 (0,624804)				Model 2 (0,675924)			
F-Statistik	Model 1 (53,595598)				Model 2 (63,964198)			

Sumber: Hasil olah data stata 14

Berdasarkan hasil pengolahan data, persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

- a) Model 1 (OLS):

$$\text{Persen_Miskin} = 25,588 - 0,000033(\text{Upah_Minimum}) - 1,772(\text{RLS}) - 0,378(\text{Stawil}) + \epsilon$$

- b) Model 2 (Logaritmik)

$$\ln(\text{Persen_Miskin}) = 7,544 - 0,270 \ln(\text{Upah_Minimum}) - 0,173(\text{RLS}) + 0,116(\text{Stawil}) + \epsilon$$

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan melihat nilai Koefisien Determinasi $[R^2]$. Model 1 memiliki nilai R^2 sebesar 0,6248, sedangkan Model 2 memiliki nilai R^2 sebesar 0,6759. Hal ini menunjukkan bahwa Model 2 (Logaritmik) mampu menjelaskan 67,59% variasi persentase kemiskinan, lebih baik dibandingkan Model 1. Selain itu, Model 2 juga terbukti bebas dari heteroskedastisitas. Oleh karena itu, Model 2 (Logaritmik) dipilih sebagai model yang paling relevan dan kuat untuk menjelaskan fenomena kemiskinan dalam penelitian ini.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian signifikansi regresi pada model terbaik (Model 2) dilakukan secara simultan (Uji F) dan parsial (Uji t) dengan hasil sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil Uji F menunjukkan nilai Prob > F sebesar 0,0000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, Upah Minimum, RLS, dan Status Kewilayahan berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Jawa.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel logaritma Upah Minimum (1n_Upah_Minimum) memiliki p-value sebesar 0,0048 (<0,05) dengan koefisien negatif. Artinya, Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan.

Variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki p-value sebesar 0,0000 (<0,05) dengan koefisien negatif. Artinya, RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan.

Variabel Status Kewilayahan memiliki p-value sebesar 0,2464 (>0,05). Artinya, status kewilayahan (kabupaten vs kota) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase kemiskinan.

Pembahasan

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Persentase Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori Human Capital. Semakin lama angkatan kerja menempuh pendidikan, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan (skill) yang dimiliki. Pada tahun 2025, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pulau Jawa terbukti efektif dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja ke sektor-sektor yang lebih produktif sehingga secara langsung menekan persentase penduduk miskin di daerah tersebut.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Persentase Kemiskinan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan. Hasil ini menarik karena memberikan perspektif yang berbeda (kontras) dengan beberapa riset terdahulu di tahun 2024 yang menemukan bahwa kenaikan upah memicu pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2025, di mana kondisi ekonomi telah sepenuhnya pulih dan stabil, peningkatan Upah Minimum terbukti mampu secara nyata meningkatkan daya beli masyarakat pekerja. Tingkat upah yang layak ini berhasil mengangkat kesejahteraan rumah tangga pekerja berpenghasilan rendah hingga melampaui garis kemiskinan, tanpa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran seperti pada masa transisi pasca-pandemi.

Pengaruh Status Kewilayahan terhadap Persentase Kemiskinan

Status kewilayahan ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada model yang diamati. Temuan ini merepresentasikan sebuah pergeseran dinamika spasial di Pulau Jawa pada tahun 2025. Tidak signifikannya variabel ini mengindikasikan bahwa kesenjangan persentase kemiskinan antara wilayah kabupaten dan kota mulai menipis. Hal ini diduga kuat merupakan dampak dari masifnya pemerataan pembangunan infrastruktur, akses digitalisasi, dan perluasan kawasan industri baru yang tidak lagi hanya terpusat di wilayah kota, melainkan sudah menjalar hingga ke wilayah administratif kabupaten. Oleh karena itu, status administratif tidak lagi menjadi pengaruh mutlak kerentanan kemiskinan persentase di suatu daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi cross-section terhadap 100 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun 2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa spesifikasi model logaritmik merupakan model estimasi yang lebih baik dibandingkan model dasar Ordinary Least Squares (OLS). Hal ini dibuktikan dengan terbebasnya model logaritmik dari masalah heteroskedastisitas serta memiliki daya penjelas (R-Squared) yang lebih tinggi, yakni sebesar 67,59% dibandingkan 62,48% pada model OLS. Secara simultan, variabel independen pada kedua model terbukti berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

Secara parsial, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi pengaruh yang paling konsisten karena terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada kedua model. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan capaian pendidikan formal di masyarakat sangat krusial dalam mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, pengaruh Upah Minimum memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi dikarenakan variabel ini belum berpengaruh signifikan secara nominal absolut pada model OLS, namun terbukti berpengaruh negatif dan signifikan ketika dianalisis dalam bentuk persentase elastisitas pada model logaritmik. Di sisi lain, Status Kewilayahan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kedua model. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan status administratif antara kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut tidak lagi cukup kuat untuk menjelaskan variasi persentase penduduk miskin pada tahun 2025, yang mencerminkan mulai terjadinya pemerataan akses ekonomi antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinayanti, E., Aulia, F. M., Rismalasari, M., Hafid, M., Wahyu, R., Putra, R. R., Kartika, V., & Widaryatmo. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi (1 ed.). Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Fahmi, A. (2019). Pengaruh infrastruktur dan keterkaitan spasial terhadap konvergensi beta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 87–105.
- Firdaus, M. R. M., & Muchlisoh, S. (2021). Determinan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 Menggunakan Spatial Error Model dengan pendekatan Fixed Effect. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 587–592.
- Firmansyah, M., & Setyari, N. P. W. (2024). Analisis Siklus Kemiskinan dan Investasi Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 45–60.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191–206.
- Kaufmann, D. (2022). Minimum Wage Policy and Poverty Alleviation in Developing Economies: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 145, 102–115.
- Kause, J., & Fithriyah, F. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2 SE-Articles), 115–127. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.98>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Dan kebijakan)*, edisi Ke empat. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The quarterly journal of economics*, 107(2), 407–437.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192.

- Pratiwi, A., & Haryanto, T. (2023). Peran Modal Manusia dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 45–58.
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan dalam perspektif struktural fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19–34.
- Sari, & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 33–45.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American economic review*, 51(1), 1–17.
- Wibowo, A., & Rohman, A. (2022). Efek Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 33(2), 150–165.